

**RKPD**

**RENCANA KERJA (RENJA)**

**TA. 2024**

**DINAS PERTANAHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena izin-Nya jualan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2024.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk merumuskan perencanaan program dan kegiatan yang akan dicapai beserta anggaran yang digunakan untuk periode tahun mendatang sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik dengan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disusun untuk memenuhi salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini memuat program dan kegiatan pada Dinas Pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah guna menunjang kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu, Program dan Kegiatan harus terarah sesuai dengan pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Adapun Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan selain dari Program yang ada di Kesekretariatan juga melaksanakan Program Penataan Pertanahan, Program Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan juga memperhatikan aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat melalui musrembang, yang didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta program prioritas pemerintah Kabupaten sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu maupun Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten. Luwu ini merupakan salah satu unsur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, akan mengalami tahap penyesuaian dan pembahasan baik ditingkat eksekutif maupun tingkat legislatif hingga pada tahap finalisasi program dan kegiatan dalam bentuk RKA dan DPA.

Kami menyadari masih banyak kekurangan – kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dan berharap adanya masukan dari pihak maupun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan Rencana Kerja di maksud.

Belopa, 1 Desember 2023

Kepala Dinas Pertanahan



**Drs. ERHAM, M.Si**

Pkt. Pembina Tk.I

NIP. 196711012007011017

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022</b>	
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan Kab. Luwu .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD .....	31
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanahan Kab. Luwu.....	32
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1. Rencana Kerja .....	36
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah .....	36
<b>BAB V PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Luwu .....	11
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu .....	19
4.1	Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 .....	36
4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 .....	37

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tahun 2024 merupakan pelaksanaan Program Kegiatan Bupati terpilih periode tahun 2019 - 2024. Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan untuk pembinaan dan pengembangan Sektor Pertanahan. Rencana tahunan ini bersifat dinamis dan berkesinambungan memuat program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan serta mengakomodir dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diusulkan melalui Forum Perangkat Daerah dan Musrebang yang dilaksanakan secara berjenjang, serta program dan kegiatan yang bersifat *by design* yang disusun berdasarkan kebijakan pembangunan Sektor Pertanahan.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana pembangun jangka panjang daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penjurusan pembangunan menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah daerah sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Revisi RPJMD adalah Rancangan Awal Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan. Renja juga sebagai bahan masukan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA) selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA).

Mengingat arti strategi Dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan Dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Caca Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah di bidang pertanahan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis/Renstra perangkat daerah. Oleh karena itu, sebagai dokumen strategis, Renja menjadi acuan perangkat daerah dalam merencanakan program dan kegiatan tahun mendatang dan menjadi salah satu alat evaluasi pencapaian kinerja tahunan perangkat daerah.

Sejalan dengan hal tersebut perumusan & penyusunan rencana kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu juga tidak terlepas dari rencana Meningkatkan Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Luwu. Karena hal tersebut merupakan tujuan rencana kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini diarahkan untuk Meningkatkan Fungsi Tanah Aset Pemda untuk Kepentingan Umum serta Meningkatnya Penyelesaian Masalah dan Sengketa Tanah di Kabupaten Luwu. Penyusunan rencana kerja ini mempertimbangkan kebutuhan prioritas dan isu- isu utama yang dihadapi bidang pertanahan.

Adapun Fungsi Renja Dinas Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2024 merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) di Bidang Pertanahan, yang dapat diukur dengan mempertimbangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun tersebut.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2024 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Luwu, Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Luwu 2022.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Luwu 2022.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan selama satu tahun kedepan dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Atau Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu adalah Rancana Kerja (Renja) Tahunan yang disusun secara bertahap setiap tahun dan berkesinambungan dengan rencana kerja sebelumnya guna mewujudkan target yang akan dicapai dalam rencana strategik / rencana jangka menengah.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun 2024 serta menjamin adanya kesinambungan dan konsistensi pembangunan Bidang Pertanahan dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan Kabupaten Luwu yang merupakan bagian dari rencana kerja Pemerintah Kabupaten Luwu.
- b. Mengarahkan Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu selama satu tahun dengan mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
- c. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu pada tahun sebelumnya.

### **1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanahan**

Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN, yang memuat tentang latar belakang; pengertian ringkas Rencana Kerja SKPD, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan dokumen Renja.
- BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN TAHUN LALU (2023), menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, yang memuat tentang uraian tujuan, sasaran dan kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu tahun 2024.
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, yang memuat tentang rencana kerja dan pendanaan Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu tahun 2024.
- BAB V PENUTUP, yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN TAHUN 2023

#### 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan Kab.

##### Luwu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Renja Dinas Pertanahan Kab. Luwu merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Pertanahan Kab. Luwu sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan. Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun – tahun sebelumnya.

Berdasarkan serapan anggaran, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanahan pada tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah anggaran secara keseluruhan sebesar Rp2.595.840.302,- (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah), terealisasi hingga Triwulan IV sebesar Rp2.489.612.466,- (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau 95,90%.

Dinas Pertanahan pada Tahun 2023 melaksanakan 4 Program, 10 Kegiatan dan 27 Sub-Kegiatan yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Redistribusi tanah, serta ganti kerugian Program kelebihan Maksimum dan tanah absentee, dan Program Penatagunaan Tanah. Adapun realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

**Sub Kegiatan :**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Anggaran sebesar Rp6.203.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.203.000,00 atau sebesar 100%.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, anggaran sebesar Rp2.460.100,00 dan terealisasi sebesar Rp2.460.100,00 atau sebesar 100%.
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA, anggaran sebesar Rp2.178.100,00 dan terealisasi sebesar Rp2.178.100,00 atau sebesar 100%.

**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Anggaran sebesar Rp1.337.841.532,00 dan terealisasi sebesar Rp1.303.768.437,00 atau sebesar 97,45%.
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD, Anggaran Sebesar Rp121.380.000,00 Dan terealisasi sebesar Rp115.380.000,00 atau sebesar 95,05%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran sebesar Rp7.793.800,00 dan terealisasi sebesar Rp7.793.800,00 atau sebesar 100%.
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, anggaran sebesar Rp4.022.200,00 dan terealisasi sebesar Rp4.022.200,00 atau sebesar 100%.

**Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.**

**Sub Kegiatan :**

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Anggaran sebesar Rp2.269.250,00 dan terealisasi sebesar Rp2.269.250,00 atau sebesar 100%.

**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Anggaran sebesar Rp3.065.700,00 dan terealisasi sebesar Rp3.065.700,00 atau sebesar 100%.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Anggaran sebesar Rp7.743.115,00 dan terealisasi sebesar Rp7.743.115,00 atau sebesar 100%.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Anggaran sebesar Rp3.812.500,00 dan terealisasi sebesar Rp3.812.500,00 atau sebesar 100%.
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran sebesar Rp6.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau sebesar 100%.
5. Penyediaan Bahan/Material, Anggaran sebesar Rp26.884.050,00 dan terealisasi sebesar Rp26.884.050,00 atau sebesar 100%.
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu, Anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau sebesar 100%.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Anggaran sebesar Rp253.889.000,00 dan terealisasi sebesar Rp234.413.000,00 atau sebesar 92,32%.
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Anggaran sebesar Rp0 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0%.

**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Anggaran sebesar Rp6.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau sebesar 100%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Anggaran sebesar Rp7.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.718.750,00 atau sebesar 93,31%.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Anggaran sebesar Rp238.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp228.300.000,00 atau sebesar 95,60%.

**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

**Sub Kegiatan :**

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Anggaran sebesar Rp5.330.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.330.000,00 atau sebesar 100%.

**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Anggaran sebesar Rp55.291.450,00 dan terealisasi sebesar Rp51.028.949,00 atau sebesar 92,29%.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Anggaran sebesar Rp1.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.500.000,00 atau sebesar 100%.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Anggaran sebesar Rp10.037.915,00 dan terealisasi sebesar Rp10.037.915,00 atau sebesar 100%.

## **B. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

**Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.**

**Sub Kegiatan :**

1. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp30.110.500,00 dan terealisasi sebesar Rp29.978.300,00 atau sebesar 99,56%.
2. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp30.013.800,00 dan terealisasi sebesar Rp29.763.000,00 atau sebesar 99,16%.

**C. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**

**Kegiatan : Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

1. Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, anggaran sebesar Rp45.138.200,00 dan terealisasi sebesar Rp45.138.200,00 atau sebesar 100%.

**D. Program Penatagunaan Tanah**

**Kegiatan : Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota.**

**Sub Kegiatan :**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp365.826.090,00 dan terealisasi sebesar Rp340.339.100,00 atau sebesar 93,03%.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra**  
**Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan) Kabupaten Luwu**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 10 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 01 2,01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00	2 dokumen	2 dokumen	100,00
2 10 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	3 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00
2 10 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 10 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2 10 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun	36 orang / bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 orang / bulan	12 bulan	100,00
2 10 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	1 laporan	100,00
2 10 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	1 laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 10 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 01 2,03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	1 laporan	100,00
2 10 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	71 unit/set	19 unit/set	19 unit/set	19 unit/set	100,00	16 unit/set	16 unit/set	100,00
2 10 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	76 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	100,00	16 Jenis	12 Jenis	75,00
2 10 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Jenis	3 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100,00	5 Jenis	4 Jenis	80,00
2 10 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	9 Jenis	3 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100,00	5 Jenis	5 Jenis	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 10 01 2,06 07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	100 Jenis	25 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100,00	37 Jenis	28 Jenis	75,68
2 10 01 2,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis kunjungan tamu yang difasilitasi	12 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100,00	2 Jenis	6 Jenis	300,00
2 10 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan / diikuti	336 OK	162 OK	58 OK	58 OK	100,00	105 OK	85 OK	80,95
2 10 01 2,06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	-	1 dokumen	0 dokumen	0,00
2 10 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	3 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100,00	1 Jenis	1 Jenis	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 10 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2 10 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2 10 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2 10 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	48 Unit	9 Unit	13 Unit	13 Unit	100,00	13 Unit	13 Unit	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 10 01 2,09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10 Unit / set	-	-	-	-	6 Unit / set	6 Unit / set	100,00
2 10 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	1 Unit	100,00	1 Unit	1 Unit	100,00
2 10 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 04 2.10	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 04 2.10 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	35 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100,00	5 dokumen	5 dokumen	100,00
2 10 04 2.10 01	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Kasus	4 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	100,00	5 Kasus	5 Kasus	100,00

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 10 06	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah absentee yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 06 2.10	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang difasilitasi penatapannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 06 2.10 02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah dokumen inventarisasi dan rekomendasi obyek redistribusi tanah	30 dokumen	5 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100,00	3 dokumen	3 dokumen	100,00
2 10 10	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	persentase lahan yang telah dilakukan penatagunaan tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 10 2.10	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan penyelenggaraan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 10 10 2.10 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah aset tanah yang bersertifikat	300 Persil	100 Persil	200 Persil	200 Persil	100,00	125 Persil	70 Persil	56,00

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Luwu, 2023

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra di atas, maka terdapat beberapa yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi disebabkan adanya kendala pada tahap pelaksanaan. Jadi pada dasarnya, kegiatan tersebut tetap terlaksana meskipun tidak lagi terukur dalam pencapaian target sesuai renstra yang ada.
2. Program/kegiatan perlu dievaluasi terkait efektifitas pelaksanaannya sehingga dapat mencapai sasaran renstra. Karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya diperlukan langkah inovatif untuk mengoptimalkan pencapaian target dengan mengefektifkan sumber daya yang ada. Langkah inovatif tersebut dapat berupa pendayagunaan sumber daya dan kerjasama operasional dengan berbagai pihak. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan**

Analisis Kinerja Dinas Pertanahan Kab. Luwu berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran beserta indikatornya sebagai berikut :

1. Menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan.
2. Mendaftarkan persertifikatan tanah aset pemerintah Kab. Luwu.
3. Menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
4. Melaksanakan penetapan lokasi persiapan pengadaan Tanah.
5. Menangani masalah-masalah pertanahan di Kab. Luwu
6. Menginventarisir data kebutuhan tanah untuk kepentingan tanah.

Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang cukup memadai, juga di dukung dengan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan organisasi, sehingga memungkinkan pencapaian kinerja yang memuaskan.

Pelaksanaan Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>IKU</b>											
1	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat	-		100.00	100.00	100.00	100.00	148.015	201.500	100.00	100.00	
2	Jumlah Luas Wilayah	-		3,000.25	3,000.25	3,000.25	3,000.25	3,000.25	3,000.25	3,000.25	3,000.25	
	<b>Presentase Lahan Bersertifikat</b>			-	-	-	-	4.93	6.71	100.00	100.00	
1	Jumlah Kasus yang diselesaikan	-		5	10	10	10	7	7	5	5	
2	Jumlah Kasus yang terdaftar	-		5	5	5	5	10	13	5	5	
	<b>Penyelesaian Kasus Tanah Negara</b>			-	-	-	-	33.33	54.00	100.00	100.00	
1	Jumlah Izin Lokasi	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Permohonan Izin Lokasi	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Penyelesaian Izin Lokasi</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Luwu, 2023

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Luwu dan Peraturan Bupati No. 153 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan. Dinas Pertanahan memiliki tugas pokok :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Petanahan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan Perencanaan strategis pada Dinas Pertanahan
2. Melaksanakan Perumusan Kebijakan teknis Bidang Pertanahan

3. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data base serta analisis data di bidang pertanahan
4. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan
5. Melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, pengsertifikatan tanah, tukar menukar tanah, penanganan permasalahan tanah serta penatagunaan tanah
6. Pelaksanaan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente
7. Meaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Dari uraian perkembangan dan permasalahan maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan oleh Kab. Luwu adalah :

- a. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan umum
- b. Belum optimalnya pengamanan tanah aset pemerintah Kab. Luwu
- c. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan
- d. Banyaknya permasalahan permasalahan tanah di Kab. Luwu
- e. Pencatatan data tanah aset pemerintah Kab. Luwu belum optimal
- f. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dengan dokumen perencanaan
- g. Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.

Tantangan serta beberapa isu-isu negatif dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemilik tanah menghendaki ganti rugi dari Apraisal
2. Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset pemerintah Kab. Luwu
3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan  
Pencatatan tanah aset belum optimal
4. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dengan perencanaan
5. Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan

Adapun Perkembangan, Permasalahan beserta Isu-isu Negatif pada Dinas Pertanahan tentu saja akan berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah jika tidak segera dibenahi, adapun Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2019-2024 serta hubungannya dengan Kinerja Dinas Pertanahan yaitu “**Kabupaten Luwu Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi**” Dalam rumusan Visi ini, ada empat pokok Visi yakni :

**Maju** mengandung Makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya Sumber Daya Manusia Berkualitas, Keadaan Sosial Ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.

**Sejahtera**, mengandung makna satu keadaan masyarakat Luwu dapat meningkatkan pemenuhan Kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

**Mandiri**, mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelolah potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

**Religi**, mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengalaman agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) misi pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang professional, beribawah, amanah, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.

5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius.
7. Optimalisasi otonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha kondusif bertwawasan lingkungan dan system pengupahan yang berkeadilan.
- a. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi public yang dinamis dan kondusif.
9. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Berdasarkan pada Misi Bupati dan Wakil Bupati diatas, maka Dinas Pertanahan Kab. Luwu akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Misi Sembilan yaitu : ***Penegakan Supremasi Hukum, Hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik.***

Dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terdapat beberapa tantangan dan peluang yang harus diperhatikan guna pencapaian kinerja yang optimal, adapun tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu yaitu :

- a. Tantangan
  - 1) Perbedaan Atas Hak yang ada dilaporkan dengan dilapangan (Lokasi) sering berbeda untuk itu dibutuhkan proses yang berulang kali untuk turun kelapangan, guna Penerbitan Sertifikat Aset Tanah Pemda.
  - 2) Terkadang Lokasi yang sudah bersih dari permasalahan, setelah peninjauan justru terjadi konflik, maka diadakan penyelesaian yang baik.
  - 3) Sering terjadi perseteruan tentang batas-batas yang tidak jelas maka perlu dihadirkan unsur-unsur aparat dan masyarakat yang mengerti untuk menemukan kepastian hukumnya agar tidak menimbulkan Sengketa/Konflik.
  - 4) Perkembangan Teknologi yang Berbasis Teknologi Informasi yang cepat untuk Penataan Tanah.

- 5) Tingginya Alih Fungsi Lahan, disebabkan adanya pengakuan kepemilikan dari masyarakat tentang Aset Tanah Pemda.
- 6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Pengalih Fungsian Lahan.
- 7) Kapasitas SDM yang belum Optimal dalam melaksanakan Tertip Administrasi Pertanahan.
- 8) Data Pertanahan setiap Instansi Pemerintah berbeda satu dengan yang lainnya.
- 9) Pemahaman sempit Aparat Pemerintah dan terutama Penegak Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang terbelenggu pada hal-hal Administrasi.
- 10) Belum Optimalnya Penyebar Luasan Informasi Pertanahan.
- 11) Belum tersedianya Regulasi Pengendalian Pertanahan yang belum memadai.

b. Peluang

- 1) Tertibnya Administrasi Pertanahan.
- 2) Adanya dukungan dari instansi terkait.
- 3) Adanya dukungan dari Masyarakat, Toko Adat serta Toko Pemuda.
- 4) Tersedianya Tanah Masyarakat untuk dijadikan pembangunan.
- 5) Adanya Peluang Kerjasama dengan pihak lain dalam hal Bimtek Workshop dan Lain-Lain untuk Peningkatan Pembangunan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan hasil Review terhadap rancangan awal RKPD, semua program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD semuanya diakomodir ke dalam Renja, namun mengingat keterbatasan anggaran kemungkinan terdapat program dan kegiatan yang tidak diakomodir ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta kemungkinan terdapat besaran rupiah yang berbeda dari Renja ke RKA, adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD data terlihat pada tabel :

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKP Tahun 2024**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Belopa, Kab. Luwu	<i>Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	2.628.829.995	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Belopa, Kab. Luwu	<i>Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	2.678.636.585	
	<i>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Belopa, Kab. Luwu	<i>Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu</i>	100%	25.000.000	<i>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Belopa, Kab. Luwu	<i>Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu</i>	100%	24.324.538	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun	2 Dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun	2 Dokumen	11.316.103	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.968.376	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.098.615	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.967.157	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.985.425	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.988.862
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>1.842.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>1.849.897.661</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	12 Bulan	1.700.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	12 Bulan	1.699.896.970
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun	12 Bulan	130.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun	12 Bulan	132.120.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1 Laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1 Laporan	10.948.789
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6.931.902

<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.938.951</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.938.951
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Cakupan ketersediaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>42.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Cakupan ketersediaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>52.621.052</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Pasang	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Pasang	49.950.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.671.052
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10.000.000	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000	-	-	-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Cakupan ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>322.629.995</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Cakupan ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>331.258.321</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Jenis	3.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Jenis	3.476.750

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.000.000	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	19 Unit/set	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	19 Unit	8.771.065
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah jenis penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	19 Jenis	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah jenis penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	19 Jenis	10.804.674
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Jenis	4.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	8.000.970
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	2 Jenis	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12.000.000
Penyediaan Bahan / Material	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	10 Jenis	16.129.995	Penyediaan Bahan / Material	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	23.694.478
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah jenis kunjungan tamu yang difasilitasi	3 Jenis	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah jenis kunjungan tamu yang difasilitasi	3 Jenis	10.625.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam Daerah, Dalam Provinsi, Luar Provinsi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan / diikuti	58 Ok	220.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam Daerah, Dalam Provinsi, Luar Provinsi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan / diikuti	58 Ok	219.956.500
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	35.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	33.928.884

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>43.974.000</b>	
	-	-	-	-	-	Pengadaan Mebel	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	13.436.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	2 Unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	2 Unit	30.538.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>337.200.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>330.300.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belopa, Kab. Luwu	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	7.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belopa, Kab. Luwu	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8.400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa, Kab. Luwu	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	10.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa, Kab. Luwu	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	14.700.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	320.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa, Kab. Luwu	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	307.200.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>41.322.062</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	13 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	13 Unit	32.080.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.341.662	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	Belopa, Kab. Luwu	<i>Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</i>	%	100.000.000	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	Belopa, Kab. Luwu	<i>Persentase sengketa tanah garapan yang telah diselesaikan melalui mediasi</i>	%	100.187.179	
	<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	Belopa, Kab. Luwu	<i>Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota</i>	2 Jenis	100.000.000	<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	Belopa, Kab. Luwu	<i>Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota</i>	2 Jenis	100.187.179	
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belopa, Kab. Luwu	Laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	5 Dokumen	50.000.000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belopa, Kab. Luwu	Laporan hasil Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.	5 Dokumen	50.056.143	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	50.000.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah konflik pertanahan yang dimediasi	5 Berita Acara	50.131.036	
3	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	Belopa, Kab. Luwu	<i>Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan</i>	%	470.000.000	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	Belopa, Kab. Luwu	<i>Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan</i>	%	470.000.000	
	<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Belopa, Kab. Luwu	<i>Pengadaan Tanah yang diselesaikan oleh Pemda</i>	100%	470.000.000	<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Belopa, Kab. Luwu	<i>Pengadaan Tanah yang diselesaikan oleh Pemda</i>	100%	470.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Persil	470.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Persil	470.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Program Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Belopa, Kab. Luwu	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah absentee yang diselesaikan	%	25.000.000	Program Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Belopa, Kab. Luwu	Persentase sengketa tanah garapan yang telah diselesaikan melalui mediasi	%	25.005.914	
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Belopa, Kab. Luwu	Persentase Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang difasilitasi penetapannya	100%	25.000.000	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Belopa, Kab. Luwu	Persentase Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang difasilitasi penetapannya	100%	25.005.914	
	Inventarisasi Subjek dan Objek	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah dokumen inventarisasi dan rekomendasi obyek redistribusi tanah	5 Dokumen	25.000.000	Inventarisasi Subjek dan Objek	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah dokumen inventarisasi dan rekomendasi obyek redistribusi tanah	5 Dokumen	25.005.914	
5	Program Penatagunaan Tanah	Belopa, Kab. Luwu	persentase lahan yang telah dilakukan penatagunaan tanah	%	400.000.000	Program Penatagunaan Tanah		Persentase lahan yang telah dilakukan penatagunaan tanah		349.998.957	
	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Belopa, Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten	%	400.000.000	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Belopa, Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten	%	349.998.957	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah aset tanah yang bersertifikat	250 Persil	400.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Belopa, Kab. Luwu	Jumlah aset tanah yang bersertifikat	150 Persil	349.998.957	

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Luwu, 2023

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahwa urusan Pertanahan merupakan urusan wajib bukan Pelayanan Dasar Pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab. Luwu. Dalam implementasinya Dinas Pertanahan mengalokasikan kegiatan Penataan, Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah guna melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Pengadaan tanah dipandang perlu untuk dilaksanakan guna mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Pertanahan juga mempunyai fungsi pengadaan inventarisasi, penanganan permasalahan tanah juga pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Luwu yang bertujuan untuk tertibnya administrasi dengan langkah pengamanan fisik, administrasi dan pengamanan hukum, dengan demikian akan tercipta tertib administrasi pertanahan.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu**

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024. Tujuan Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Rencana Kerja Tahunan ini merupakan tahapan pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrembang di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten serta sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten khususnya berkaitan dengan sektor pertanahan, dengan tujuan agar rencana kerja tahun 2024 memberikan gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan,

sasaran yang akan dicapai serta perkiraan dana yang dibutuhkan dari program dan kegiatan tersebut.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Serta Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang ditunjukkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu.

### **3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanahan Kab. Luwu**

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan nomenklatur kegiatan yang didasarkan pada kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2019 – 2024. Kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan :**
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri 6 (enam) Kegiatan :
    - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
    - Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 4 (Empat) kegiatan :
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
    - Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 (Satu) kegiatan :
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) kegiatan :
- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
  - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan peralatan rumah tangga;
  - Penyediaan bahan logistik kantor;
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan bahan/material;
  - Fasilitasi kunjungan tamu;
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
  - Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (Dua) kegiatan :
- Pengadaan Mebel;
  - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- g. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**2) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dengan**

**Sub-Kegiatan :**

- a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) kegiatan :
- Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
  - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

**3) Program Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, dengan Sub-Kegiatan :**

- a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
- Inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah;
  - Inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah.

**4) Program Penatagunaan Tanah, dengan Sub-Kegiatan :**

- a. Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan :
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota.

**3.4. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran.**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 meliputi :

1. Bagian Kesekretariatan yang merupakan tugas penunjang kelancaran tugas substantif Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Bidang Sengketa dan Konflik Pertanahan, yaitu : Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
3. Bidang Penataan Pertanahan yaitu : Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dan Program Penatagunaan Tanah.

Adapun indikator kinerja dan sasaran yang akan dicapai dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan pada Kesekretariatan, sbb :
  - Indikator kinerja yaitu terwujudnya Pelayanan Administrasi dan sarana/prasarana aparatur selama satu tahun agar dukungan kepada 2 (dua) bidang pada Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu dapat terlaksana dengan lancar.
2. Indikator Kinerja dari program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, sbb :
  - Terwujudnya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan, konflik pertanahan milik pemda.
  - Terwujudnya mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan milik pemda.
3. Indikator Kinerja dari program Penataan Pertanahan, sbb :
  - Tersedinya sertifikat tanah milik pemda.
  - Terwujudnya lokasi/lahan bagi pembangunan untuk kepentingan pemda.
  - Terwujudnya inventarisir tanah asset milik pemda.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**4.1 Rencana Kerja**

Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, adapun jumlah program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2024 sebanyak 4 Program dengan 12 kegiatan dengan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Dinas Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2019 - 2024. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertera pada Bab III Rencana Kerja ini, Dinas Pertanahan Kab. Luwu menetapkan indikator sasaran dan tujuan beserta targetnya sebagai tolak ukur pencapaian kinerja tahun anggaran 2024, sebagaimana disajikan pada tabel 4 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2024
1	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Keuangan, aset, kepegawaian serta adminstrasi umum	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	BB
2	Meningkatkan Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Luwu	Meningkatnya penyelesaian Masalah dan Sengketa Tanah di Kabupaten Luwu	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	90%
		Meningkatkan Fungsi Tanah Aset Pemda untuk Kepentingan Umum	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	90%

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Luwu, 2023

**4.2 Pendanaan Perangkat Daerah**

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan, kebutuhan pendanaan tahun anggaran 2024 pada Dinas Pertanahan Kab. Luwu direncanakan sebesar **Rp3.623.828.635,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)** yang bersumber dari Pendapatan bagi Hasil Pajak. lebih terinci rencana pendanaan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 terlihat pada tabel 4.2.

TABEL 4.2

## RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANAHAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Sub-Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Belopa, Kab. Luwu	100%	3.623.828.635	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		Belopa, Kab. Luwu	100%	3.623.828.635	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	Belopa, Kab. Luwu	100%	2.678.636.585	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu	Belopa, Kab. Luwu	100%	24.324.538	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun	Belopa, Kab. Luwu	2 Dokumen	11.316.103	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Belopa, Kab. Luwu	1 Dokumen	2.968.376	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	1 Dokumen	2.098.615	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Belopa, Kab. Luwu	2 Dokumen	2.967.157	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Sub-Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	8	9
2 10 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa, Kab. Luwu	3 Dokumen	1.985.425	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belopa, Kab. Luwu	4 Dokumen	2.988.862	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
<b>2 10 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>100%</b>	<b>1.849.897.661</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>
2 10 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Belopa, Kab. Luwu	12 Bulan	1.699.896.970	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun	Belopa, Kab. Luwu	12 Bulan	132.120.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Belopa, Kab. Luwu	1 Laporan	10.948.789	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Belopa, Kab. Luwu	2 Laporan	6.931.902	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Sub-Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	8	9
2 10 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>100%</b>	<b>4.938.951</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>
2 10 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa, Kab. Luwu	1 Laporan	4.938.951	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>100%</b>	<b>52.621.052</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>
2 10 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Belopa, Kab. Luwu	45 Pasang	49.950.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Belopa, Kab. Luwu	1 Dokumen	2.671.052	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>100%</b>	<b>331.258.321</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>
2 10 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Belopa, Kab. Luwu	17 Jenis	3.476.750	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Belopa, Kab. Luwu	19 Unit	8.771.065	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	Belopa, Kab. Luwu	19 Jenis	10.804.674	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	Belopa, Kab. Luwu	12 Bulan	8.000.970	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Sub-Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	8	9
2 10 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	Belopa, Kab. Luwu	12 Bulan	12.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	Belopa, Kab. Luwu	12 Bulan	23.694.478	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis kunjungan tamu yang difasilitasi	Belopa, Kab. Luwu	3 Jenis	10.625.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan / diikuti	Belopa, Kab. Luwu	58 Ok	219.956.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belopa, Kab. Luwu	1 Dokumen	33.928.884	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>100%</b>	<b>43.974.000</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>
2 10 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Belopa, Kab. Luwu	2 Unit	13.436.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Belopa, Kab. Luwu	2 Unit	30.538.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Sub-Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	8	9
2 10 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>100%</b>	<b>330.300.000</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>
2 10 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Belopa, Kab. Luwu	12 Bulan	8.400.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Belopa, Kab. Luwu	12 Bulan	14.700.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Belopa, Kab. Luwu	12 Bulan	307.200.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Belopa, Kab. Luwu</b>	<b>100%</b>	<b>41.322.062</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>
2 10 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Belopa, Kab. Luwu	13 Unit	32.080.400	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Belopa, Kab. Luwu	7 Unit	3.900.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2 10 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Belopa, Kab. Luwu	3 Unit	5.341.662	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Sub-Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	8	9
2 10 '04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang telah diselesaikan melalui mediasi	Belopa, Kab. Luwu	100%	100.187.179	DAU
2 10 '04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan melalui mediasi dalam 1 (satu) tahun	Belopa, Kab. Luwu	100%	100.187.179	DAU
2 10 '04 2.01 0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.	Belopa, Kab. Luwu	5 Dokumen	50.056.143	DAU
2 10 '04 2.01 0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah konflik pertanahan yang dimediasi	Belopa, Kab. Luwu	5 Berita Acara	50.131.036	DAU
2 10 '05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Belopa, Kab. Luwu	100%	470.000.000	DAU
2 10 '05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Belopa, Kab. Luwu	100%	470.000.000	DAU
2 10 '05 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belopa, Kab. Luwu	1 Paket	470.000.000	DAU

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Sub-Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	8	9
2 10 06	Program Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah absentee yang diselesaikan	Belopa, Kab. Luwu	100%	25.005.914	DAU
2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang difasilitasi penatapannya	Belopa, Kab. Luwu	100%	25.005.914	DAU
2 10 06 2.01 0001	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Dokumen hasil inventerisasi	Belopa, Kab. Luwu	1 Dokumen	25.005.914	DAU
2 10 10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase lahan yang telah dilakukan penatagunaan tanah diselesaikan	Belopa, Kab. Luwu	100,00%	349.998.957	DAU
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan penggunaan tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten	Belopa, Kab. Luwu	100%	349.998.957	DAU
2 10 10 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten	Jumlah persil tanah yang dilakukan kordinasi dan sinkronisasi dalam rangka konsolidasi tanah kabupaten	Belopa, Kab. Luwu	150 Persil	349.998.957	DAU

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Luwu, 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan penjabaran proses pencapaian tujuan Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024.

Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan setelah RKPD ditetapkan. Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Adapun Implementasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp2.489.612.466,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau 95,90%.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2024 merupakan upaya dinas dalam mewujudkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu melalui penjabaran Visi dan Misi Bupati Luwu Periode 2019-2024. Kiranya Ranhir Renja ini menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanahan serta panduan teknis dalam pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024.

Belopa, 1 Desember 2023

Kepala Dinas Pertanahan

  
**Drs. ERHAM, M.Si**  
Pkt. Pembina Tk.I  
NIP. 196711012007011017